

**EFEKTIVITAS INVENTARISASI ASET DAERAH PADA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA)  
KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu  
Sosial Universitas Negeri Padang Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh

**YAN HAMIMI  
1201592**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2016**

## PENCESAHAN SKRIPSI

Nama : Yan Hamimi  
NIM/BP : 1201592/2012  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial  
Judul : Efektivitas Inventarisasi Aset Daerah Pada Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

Padang, 9 Agustus 2016

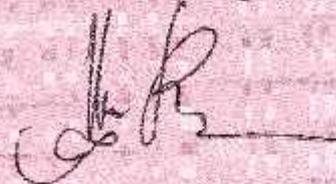
Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Drs. Yasril Yunus, M.Si  
NIP. 19531017 198211 1 002

Pembimbing II,



Nora Eka Putri, S.IP, M.Si  
NIP. 19850312 200812 2 006

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

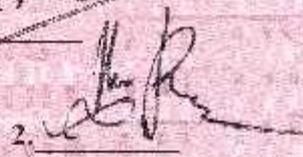
Pada hari Sabtu, Tanggal 20 Agustus 2016 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

**Judul** : Efektivitas Inventarisasi Aset Daerah Pada Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang

**Nama** : Yan Hamini  
**NIM/BP** : 1201592/2012  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ilmu Sosial

Padang, 20 Agustus 2016

### Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
<b>Ketua</b>	: Drs. Yasril Yunus, M.Si	1. 
<b>Sekretaris</b>	: Nora Eka Putri, S.IP, M.Si	2. 
<b>Anggota</b>	: Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D	3. 
<b>Anggota</b>	: Dra. Jumiati, M.Si	4. 
<b>Anggota</b>	: Adil Mubarak, S.IP, M.Si	5. 

Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd  
NIP. 19621001 198903 1 002

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Yan Hamimi  
**NIM/BP** : 1201592/2012  
**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Inventarisasi Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang” ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Padang, Agustus 2016

Saya menyatakan



**Yan Hamimi**

## ABSTRAK

### **YAN HAMIMI 1201592. EFEKTIVITAS INVENTARISASI ASET DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (BPKA) KOTA PADANG**

Latar Belakang dilakukannya penelitian ini karena masih belum terinventarisasinya aset daerah Kota Padang. Pelaksanaan inventarisasi ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Namun masih terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya barang yang terdapat dalam kartu inventaris barang yang tidak ditemukan keberadaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas inventarisasi aset daerah dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan inventarisasi aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan, menuturkan, dan menafsirkan suatu keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Pemilihan informan dalam penelitian ini memakai *Teknik Purpose Sampling*. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan dapat dikelompokkan dalam 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan ini bahwa pelaksanaan inventarisasi kurang efektif dan belum terlaksana dengan baik, karena terdapat kendala diantaranya kualitas dari sumber daya manusia yang kurang terampil, masih ditemukannya tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan berupa sertifikat, sehingga dapat terjadinya penyerobotan oleh pihak lain. Masih ada jumlah dan nilai aset tetap dalam Kartu Invertaris Barang (KIB) belum sesuai dengan kondisi dilapangan. Masih terdapat aset tetap milik Pemerintah Kota Padang yang tercatat di kartu inventaris barang tidak diketahui keberadaannya.

**Kata Kunci :** *Efektivitas, Inventarisasi, Aset daerah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Efektivitas Inventarisasi Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang**”.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Misbetti dan Ayahanda Hendri dengan segala pengorbanannya yang telah memberikan kesungguhan Do'a, bantuan moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Nora Eka Putri, S.IP, M.Si sebagai dosen pembimbing II, serta ucapan terima kasih kepada Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D , Ibu Dra. Jumiati, M.Si dan Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si sebagai Tim Penguji yang telah memberikan masukan-masukan dan saran yang sangat berguna bagi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

3. Bapak dan Ibu dosen pengajar beserta staff administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang yang telah memberikan data dan bersedia meluangkan waktunya untuk penulis wawancara.
5. Adikku tercinta Rahmad dan Yan Azifah yang menjadi sumber semangatku.
6. Inneke Pratiwi, Imda Mona Gita, Jori Reznanda, dan Veny Alvionora yang sama-sama berjuang mendapatkan gelar Sarjana.
7. Rekan-rekan Selaguri 17 Rini Susanti dan Elvadila Zahri yang memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2012, Universitas Negeri Padang.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu saran, kritik dan perbaikan senantiasa diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Padang, Agustus 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. KajianTeori	
1. Konsep Efektifitas .....	9
2. Konsep Inventarisasi .....	16
3. Konsep Aset dan Barang Milik Daerah (BMD).....	19
4. Konsep Teori Kendala.....	34
B. Kerangka Konseptual .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Informan Penelitian .....	38
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	39
E. Uji Keabsahan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43

**BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

A. Temuan Umum.....45  
B. Temuan Khusus.....58  
C. Pembahasan.....75

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....89  
B. Saran.....90

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	38
Tabel 4.1 Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang.....	59
Tabel 4.2 Daftar Rencana Kebutuhan Barang Unit (DRKBU).....	62
Tabel 4.3 Daftar Rekap Cek Fisik Kendaraan Roda Empat.....	66

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset .....	57

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pelaksanaan pekerjaan kantor dan kewajibannya, maka karyawan memerlukan barang inventaris kantor untuk kelancaran tugas dan pencapaian tujuan. Keberadaan barang-barang inventaris kantor memerlukan proses pengelolaan, pencatatan atau pelaporan barang untuk mengetahui jumlah barang, penambahan barang yang ada maupun untuk mengetahui laporan mutasi atau penghapusan barang-barang inventaris harus dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Perubahan paradigma baru pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah atau Aset Negara/Daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah memunculkan optisme baru dalam penataan dan pengelolaan aset Negara/Daerah yang tertib, akuntabel dan transparan.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, maka barang milik daerah perlu dikelola secara tertib, akuntabel dan transparan agar dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah juga meningkatkan tertib administrasi dan inventarisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disegala bidang termasuk

didalamnya tertib administrasi barang yang dimiliki daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Inventarisasi merupakan salah satu kegiatan pengelolaan barang milik daerah, inventarisasi ini juga sangat berguna dalam memberikan masukan (input) yang sangat berharga atau berguna bagi efektivitas dalam kegiatan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan barang milik daerah, karena inventarisasi ini sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam semua kegiatan pengelolaan barang dan aset milik negara. Hal tersebut sesuai dengan pengertian inventarisasi menurut Gima Sugiyama (2013:173). Inventarisasi merupakan serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendapatan aset dan mendokumentasikannya, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu.

Pengelolaan aset daerah menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta penciptaan akuntabilitas publik.. Secara yuridis pentingnya pengelolaan aset daerah secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang kemudian diatur pula dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Brang Milik Daerah.

Sejak diterapkannya peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah di atas, baik negara maupun daerah harus melaksanakan setiap siklus pengelolaan aset sesuai dengan ketentuan atau

prosedur umum yang ada dalam peraturan tersebut. Setiap tahapan dari pengelolaan barang milik daerah harus mengikuti prosedur pengelolaan aset yang telah ditentukan agar tercipta keteraturan dalam pengelolaan aset daerah secara keseluruhan.

Inventarisasi berperan penting dalam kegiatan manajerial suatu instansi, inventarisasi dipahami sebagai pencatatan mengenai barang-barang perkantoran yang telah dibeli, diterima, dibagikan, dipakai pada seluruh komponen organisasi, baik mengenai barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Inventarisasi digunakan untuk menentukan jumlah barang yang tersedia optimal. Pengecekan terhadap persediaan yang ada dilakukan secara berkala hingga saat jumlah persediaan yang dimiliki mencapai suatu tingkat atau batas tertentu.

Pelaksanaan inventarisasi barang dan aset daerah berpengaruh terhadap semua fungsi sistem operasi. Tujuan dari pelaksanaan inventarisasi adalah menyediakan persediaan peralatan kantor dengan jumlah dan waktu yang sesuai dengan kebutuhan. Pelaksanaan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Inventarisasi ini dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik daerah. Oleh karena itu inventarisasi barang dan aset milik negara harus dikelola dengan sebaik mungkin.

Mardiasmo dalam Sutaryo menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan.

Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

Dengan inventarisasi aset atau kekayaan negara diharapkan akan mampu memperbaiki dan menyempurnakan administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi barang milik daerah tersebut diproyeksikan kedepan akan apat terwujud database barang milik daerah yang akurat, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kemala Nur Shabrina (2014) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pengamanan aset Pemerintah Kota Surabaya baik secara administratif, fisik, maupun hukum berjalan tidak efektif namun akuntabel. Permasalahan yang ditemui dari pelaksanaan pengamanan baik secara administrasi, fisik, maupun hukum yaitu belum terinventarisirnya aset tanah milik Pemerintah Kota Surabaya yang akurat dalam SIMBADA, kurangnya sumber daya aparatur pengamanan fisik dalam memonitor aset tanah milik Pemkot, penguasaan tanah milik Pemkot oleh pihak ketiga tanpa adanya hubungan hukum yang jelas, kurangnya sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas untuk melakukan monitoring di lapangan, dan beberapa aset tanah milik Pemerintah Kota Surabaya yang belum bersertifikat.

Salah satu masalah utama pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah ketidaktertiban administrasi dalam pengendalian inventarisasi aset. Padahal, inventarisasi aset merupakan ”jantung” didalam siklus pengelolaan aset. Kondisi ini jelas menyebabkan pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk mengetahui secara pasti seberapa besar aset yang dimiliki, aset-aset mana saja yang telah dikuasai. Selain itu permasalahan yang terjadi pada pemerintah daerah dalam pengelolaan barang milik daerah adalah sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, kurang ahli atau kurang terlatih, hal ini mengakibatkan barang yang dikelola cenderung tidak optimal pada saat melakukan inventarisasi aset daerah.

Masalah yang penulis temui pada Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang yaitu adanya jumlah dan nilai aset dalam Kartu Inventaris Barang belum sesuai dengan kondisi dilapangan. Masih ada dijumpai barang-barang yang telah didaftarkan ataupun diajukan untuk dilakukan suatu tindakan penghapusan namun pada saat dilakukan survey wujud atau kondisi barang tersebut sudah tidak ada, hal tersebut bisa saja terjadi karena barang hilang sehingga barang yang semula ada menjadi tidak ada yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara catatan dengan fisik atau fakta yang ada. Bukti kepemilikan dokumen atas aset daerah tidak jelas sehingga masih ditemukannya aset daerah seperti tanah yang tidak memiliki sertifikat. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Jafri selaku staf sub bidang penatausahaan mengatakan bahwa: “tanah bekas penjajahan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dokumen berupa sertifikat, hal ini menyebabkan sulitnya melakukan pendataan dan pencatatan mengenai pengelolaan aset daerah.

Masalah lain yang penulis temui adalah bagaimana karyawan itu dalam memanfaatkan aset daerah, yang mana dalam memanfaatkan aset daerah, pengguna barang bertanggung jawab langsung terhadap barang yang digunakannya. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Jafri mengatakan bahwa: “pengguna barang lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai penggunaan barang, dalam pemanfaatan kendaraan oleh salah satu SKPD yang telat membayar pajak kendaraan, kemudian dikeluarkan kebijakan bahwa pajak tetap ditanggung oleh daerah namun beban atau denda atas keterlambatan dibebankan kepada pengguna barang itu sendiri”. Selain itu masalah yang penulis temui adanya kelalaian dalam kegiatan pemberian kode pada barang inventaris kantor sehingga sulit untuk mendata dan mengetahui jangka masa pemakaian dari barang tersebut, hal ini mengakibatkan terganggunya pendataan terhadap perencanaan pemeliharaan terhadap barang tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **Efektivitas Inventarisasi Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih ditemukannya aset daerah Kota Padang yang belum memiliki dokumen kepemilikan yang sah berupa sertifikat.

2. Kurangnya tanggung jawab pengguna barang terhadap pemanfaatan atas aset daerah.
3. Masih ada jumlah dan nilai aset tetap dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) belum sesuai dengan kondisi dilapangan.
4. Sumber daya manusia yang masih sangat terbatas, kurang ahli atau kurang terlatih, hal ini mengakibatkan barang yang dikelola cenderung tidak optimal pada saat melakukan inventarisasi aset daerah.
5. Masih adanya ditemukan aset tetap milik Pemerintah Kota Padang yang tercatat di kartu inventaris barang tidak diketahui keberadaannya.
6. Adanya kelalaian dalam kegiatan pemberian kode pada barang inventaris kantor yang mengakibatkan terganggunya pendataan terhadap perencanaan pemeliharaan terhadap barang tersebut.
7. Masih ada dijumpai barang-barang yang telah didaftarkan ataupun diajukan untuk dilakukan suatu tindakan penghapusan, namun pada saat dilakukan survey wujud atau kondisi barang tersebut sudah tidak ada, hal tersebut bisa saja terjadi karena barang hilang sehingga barang yang semula ada menjadi tidak ada yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara catatan dengan fisik atau fakta yang ada

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas penulis membatasi masalah yaitu pelaksanaan inventarsiasi aset daerah yang dikaji dari aspek pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset daerah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas inventarisasi aset daerah pada Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam efektivitas inventarisasi aset daerah pada Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis mengambil tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui efektivitas inventarisasi aset daerah pada Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam efektivitas inventarisasi aset daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini maka manfaat penelitiannya sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat di dalam pengembangan mata kuliah jurusan ilmu administrasi negara, yaitu mata kuliah manajemen perkantoran.

2. Secara praktik

Secara praktik bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang agar kedepannya lebih baik.